

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dinamika politik di Indonesia, pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak lagi semata-mata menjadi kontestasi antarkandidat, melainkan juga arena pertarungan aktor-aktor nonkandidat yang bekerja di balik layar. Salah satu fenomena yang menonjol dalam dua dekade terakhir adalah munculnya peran *kingmaker*. Individu yang tidak mencalonkan diri secara langsung, namun memiliki kapasitas signifikan untuk menentukan siapa yang berkuasa.

Menurut Brams dan Kilgour (2010), *kingmaker* didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang memiliki dua kekuatan utama: kekuatan untuk memilih pemimpin (*power to choose leader*) dan kekuatan untuk menentukan arah dukungan koalisi (*power to direct support*). Dalam konteks politik lokal di Indonesia, fenomena ini bukan hal baru. Mietzner (2009), sebagaimana dikutip dalam Setyawibawa et al., (2025) mencatat bahwa kepala daerah kerap berperan sebagai "arsitek politik" yang memilih penggantinya dari kalangan kerabat untuk memastikan transisi kekuasaan yang aman. Senada dengan itu, Susdarwono dan Wiranta (2025) menganalogikan *kingmaker* dengan prajurit pretorian yang dikenal memiliki kekuatan untuk mengangkat dan menjatuhkan kaisar. Meski tidak menjadi penguasa secara formal, mereka berperan sebagai penentu arah suksesi dan figur yang berhak memegang kekuasaan.

Praktik *kingmaker* dalam Pilkada Indonesia hadir dalam beragam bentuk dan aktor. Rusman, Rafni, dan Suryanef (2022) menunjukkan bagaimana modal sosial Joko Widodo dimobilisasi dalam kemenangan Gibran Rakabuming Raka di Surakarta dan Bobby Nasution di Medan pada Pilkada 2020. sebuah praktik *kingmaker* berbasis politik kekerabatan. (Dona, 2022) memetakan fenomena serupa dalam konteks dinasti politik di era otonomi daerah, di dalamnya kepala daerah berperan sebagai *kingmaker* untuk melanggengkan pengaruh keluarga. Sementara itu, Ilham, Asdar, dan Muhammad (2024) menelaah peran komunikasi politik elit seperti Rusdi Masse dan Jusuf Kalla dalam Pilkada Makassar 2020.

Dari pemetaan tersebut, terlihat bahwa kajian *kingmaker* di Indonesia sebagian besar masih terfokus pada dua karakter utama: *kingmaker* dinasti politik (berbasis kekerabatan) dan *kingmaker* elit nasional (berbasis modal sosial nasional). Sementara itu, kajian terhadap *kingmaker* nondinasti di level kabupaten, yakni elit politik lokal yang membangun dukungan berbasis kapital simbolik dan kultural, bukan ikatan darah maupun jabatan nasional masih jarang dikaji secara mendalam.

Fenomena *kingmaker* nondinasti yang menjadi fokus penelitian ini tidak muncul secara tiba-tiba pada Pilkada Purwakarta 2024. Pola peran Dedi Mulyadi sebagai aktor politik di balik layar telah memiliki preseden empiris pada Pilkada Purwakarta 2018, ketika ia mendukung pencalonan istrinya saat itu, Anne Ratna Mustika (Ambu Anne), yang akhirnya terpilih sebagai bupati perempuan pertama Kabupaten Purwakarta untuk periode 2018–2023 dengan perolehan 218.429 suara atau 44,01% dalam kontestasi tiga pasangan calon. Meskipun dukungan tersebut masih berada dalam kerangka dinasti politik, kasus tersebut menunjukkan adanya pola awal keterlibatan Dedi Mulyadi dalam menentukan suksesi kepemimpinan lokal. Kondisi ini menunjukkan transformasi peran Dedi Mulyadi pada Pilkada Purwakarta 2024, yakni dari *kingmaker* berbasis kekerabatan menuju *kingmaker* nondinasti yang bertumpu pada kapital simbolik dan kultural yang dimilikinya.

Transformasi tersebut tampak secara nyata dalam Pilkada Purwakarta 2024, ketika Dedi Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta sekaligus Gubernur Jawa Barat, secara terbuka dan aktif mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Saepul Bahri Binzein dan Abang Ijo Hapidin (Zeinjo). Dukungan tersebut tidak hanya disampaikan secara verbal, tetapi juga diwujudkan melalui keterlibatan dalam berbagai aktivitas konsolidasi yang berlangsung sebelum masa kampanye resmi dimulai.

Salah satu bentuk keterlibatan tersebut terlihat dalam gelaran “KDM Menyapa Purwakarta Semakin Istimewa” pada 19 Juli 2024 di Desa Babakan, Kecamatan Wanayasa. Penyelenggaraannya bertepatan dengan momen peringatan Hari Jadi Kabupaten Purwakarta yang jatuh sehari setelahnya, pada 20 Juli, sehingga nuansa perayaan daerah turut dimanfaatkan sebagai latar

simbolik untuk menguatkan kedekatan dengan warga. Selain hadir secara fisik, elit politik Dedi Mulyadi juga ditampilkan dalam materi visual yang tersebar luas kepada publik, khususnya melalui pamflet acara.



Gambar 1.1. Pamflet acara (Sumber: Instagram @hasantujuhpillar)

Dedi Mulyadi tampil sebagai elit politik utama dengan menonjolkan wajahnya di bagian atas pamflet, diikuti dengan foto pasangan calon Saepul Bahri Binzein dan Abang Ijo Hapidin (Zeinjo) yang disebut secara eksplisit di bagian bawah. Kehadiran bintang hiburan seperti Doel Sumbang dan Kang Sule juga menambah suasana meriah acara, yang dikemas sebagai hiburan rakyat. Namun di balik atmosfer tersebut, acara ini menjadi panggung simbolik untuk mengumumkan dukungan politik secara terbuka kepada pasangan Zeinjo, jauh sebelum masa kampanye resmi dimulai. Simbolisasi ini tidak berhenti pada visual pamflet, tetapi semakin diperkuat melalui penataan panggung dan gesture politik dalam acara.



Gambar 1.2. Dedi Mulyadi bersama pasangan Zeinjo dalam acara “KDM Menyapa Purwakarta”(Sumber: jabar.antaranews.com, 2024)

Dedi Mulyadi pada gambar di atas terlihat duduk di tengah panggung, mengenakan pakaian adat sunda putih, diapit langsung oleh Saepul Bahri Binzein dan Abang Ijo Hapidin, ketiganya tampak tersenyum dan menunjukkan keakraban di hadapan massa. Kombinasi antara pamflet dan situasi lapangan ini menegaskan bahwa acara tersebut tidak hanya dirancang untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, tetapi juga menjadi sarana strategis dalam membentuk opini publik dan mengukuhkan legitimasi pasangan Zeinjo sebagai calon yang "direstui" oleh elit politik kuat (Khumaini, 2024). Dengan cara ini, Dedi Mulyadi menunjukkan peran khas seorang *kingmaker* yang tidak maju dalam kontestasi, namun mengarahkan jalannya peta politik lokal secara efektif.

Peran Dedi Mulyadi dalam mendukung pasangan Zeinjo tidak terbatas pada panggung hiburan atau tampilan visual semata. Setelah menciptakan impresi awal melalui pendekatan kultural dan emosional, ia melanjutkan keterlibatannya dalam forum-forum politik formal yang lebih terstruktur. Salah satu momen penting yang memperlihatkan bentuk keterlibatan tersebut terdokumentasi pada gambar berikut.



Gambar 1.3. Dedi Mulyadi bersama pasangan Zeinjo dalam forum pemenangan (Sumber: Locus Online, 2024)

Dedi Mulyadi memimpin forum konsolidasi pemenangan pasangan Zeinjo yang digelar secara resmi di Purwakarta pada awal November 2024. Dalam momen tersebut, ia berdiri bersama Saepul Bahri Binzein dan Abang Ijo Hapidin, mengangkat tangan mereka di hadapan publik dan media sebagai bentuk penegasan dukungan. Gestur ini mencerminkan komitmen politik dan moral Dedi Mulyadi terhadap pasangan yang ia usung. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa dukungan itu tidak diberikan sembarangan, melainkan dilandasi keyakinan bahwa amanah yang akan diemban keduanya adalah tanggung jawab besar untuk melayani rakyat dengan sepenuh hati (Bhegin, 2024).

Ia juga menekankan pentingnya integritas dalam kepemimpinan. Jika terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyatakan akan mengawasi langsung jalannya pemerintahan pasangan Zeinjo dan tidak segan turun tangan apabila keduanya gagal menjalankan amanah (Bhegin, 2024). Pernyataan ini menegaskan bahwa relasi antara Dedi Mulyadi sebagai *kingmaker* dan kandidat yang didukungnya bukan hanya bersifat elektoral, melainkan juga mencerminkan keterikatan moral dan simbolik yang memperlihatkan peran kepemimpinan yang aktif dari balik layar.

Dukungan Dedi Mulyadi terhadap Saepul Bahri Binzein juga dilatarbelakangi oleh kedekatan personal yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Keduanya merupakan sahabat lama yang berawal dari interaksi mereka sebagai sesama aktivis mahasiswa. Dalam berbagai pergerakan sosial di masa muda, mereka kerap berada dalam ruang perjuangan yang sama, membentuk

relasi yang erat dan saling memahami visi satu sama lain. Hubungan ini terus berlanjut hingga ke panggung politik lokal, di mana keduanya kembali bertemu dalam peran yang berbeda. Dedi Mulyadi sebagai tokoh senior yang disegani, dan Saepul Bahri sebagai calon pemimpin daerah yang ia percaya.



Gambar 1.4. Dedi Mulyadi, Saepul Bahri, dan Purwanto (Sumber: Lensapurwakarta, 2024; Instagram @omzein_72)

Pada gambar 1.4. merekam momen keakraban yang mencerminkan relasi persahabatan di luar arena politik formal. Kebersamaan tersebut memperkuat kesan bahwa hubungan antara Dedi Mulyadi dan Saepul Bahri telah terjalin melalui perjalanan panjang yang dilandasi rasa saling percaya dan kedekatan personal. Hal ini pula yang ditegaskan Dedi Mulyadi secara terbuka menjelang Pilkada Purwakarta 2024. Dalam sebuah wawancara media, ia menyatakan mengenal betul karakter dan dedikasi Saepul Bahri terhadap kepentingan masyarakat. Keyakinan tersebut menjadi alasan kuat di balik dukungannya, yang bukan semata dilandasi kalkulasi strategis, tetapi juga berakar pada ikatan emosional dan sejarah kebersamaan yang panjang (Winarsih, 2024).

Keterlibatan Dedi Mulyadi dalam kemenangan pasangan Zeinjo juga tidak hanya tampak dari dukungan simbolik dan orasi publik, tetapi juga tercermin dalam struktur tim yang lebih formal dan terorganisir. Salah satu bukti konkretnya adalah bergabungnya Maula Akbar Mulyadi Putra, putra kandung Dedi Mulyadi, dalam tim kemenangan pasangan Saepul Bahri Binzein dan Abang Ijo Hapidin. Maula didaulat sebagai anggota Dewan Penasehat, posisi yang strategis dan menunjukkan bahwa dukungan ini tidak hanya bersifat personal, tetapi juga telah melembaga dalam struktur politik keluarga Dedi Mulyadi.

Dalam rilis resmi yang diumumkan pada September 2024, nama Maula tercantum bersama sejumlah tokoh lainnya dalam daftar susunan tim kampanye, yang menunjukkan bahwa keluarga Dedi Mulyadi menjadi bagian integral dalam proses konsolidasi dan arah strategi kemenangan Zeinjo (Wisesa, 2024). Keikutsertaan Maula memperlihatkan bahwa dukungan politik yang diberikan Dedi Mulyadi tidak bersifat temporer atau insidental. Sebaliknya, keterlibatan ini disusun melalui pendekatan yang sistematis, dengan menggabungkan kekuatan jaringan personal, struktural, dan simbolik yang ia miliki. Dengan menempatkan putranya dalam posisi formal di tim kampanye, Dedi Mulyadi memperluas dukungan politiknya sekaligus menguatkan peranannya sebagai *kingmaker* di balik pencalonan Zeinjo.

Semua elemen itu membentuk satu kesatuan yang sistematis dan berdampak langsung terhadap perjalanan politik pasangan calon yang ia usung. Salah satu wujud nyata dari peran tersebut terlihat dalam konsistensi arah dukungan yang berkontribusi pada kemenangan Zeinjo dalam Pilkada Purwakarta 2024.

Tabel 1.1. Perolehan Suara Pilkada Purwakarta 2024 berdasarkan data resmi KPU, diolah oleh peneliti

No	Kecamatan	Saepul-Hapidin		Yadi-Pipin		Anne-Budi		Zainal-Sona		Total Suara / Kecamatan	Margin Perolehan Suara
1	Purwakarta	33,046	37%	41,526	46%	7,271	8%	8,326	9%	90,169	-9%
2	Campaka	13,384	47%	10,254	36%	3,394	12%	1,260	4%	28,292	11%
3	Jatiluhur	18,448	47%	15,044	39%	3,218	8%	2,342	6%	39,052	9%
4	Plered	20,102	49%	10,470	26%	5,903	14%	4,371	11%	40,846	24%
5	Sukatani	18,402	48%	16,993	44%	1,743	5%	1,366	4%	38,504	4%
6	Darangdan	22,649	61%	10,105	27%	2,112	6%	2,302	6%	37,168	34%
7	Maniis	10,637	63%	3,545	21%	1,421	8%	1,352	8%	16,955	42%
8	Tegalwaru	15,911	59%	7,454	28%	1,912	7%	1,629	6%	26,906	31%
9	Wanayasa	11,078	47%	9,250	39%	2,087	9%	1,341	6%	23,756	8%
10	Pasawahan	12,405	47%	10,878	41%	1,554	6%	1,698	6%	26,535	6%
11	Bojong	17,310	61%	7,181	25%	1,873	7%	1,902	7%	28,266	36%
12	Babakancikao	15,749	51%	11,297	37%	1,639	5%	2,142	7%	30,827	14%
13	Bungursari	9,732	30%	19,902	61%	1,981	6%	1,246	4%	32,861	-31%
14	Cibatu	9,862	56%	5,475	31%	1,471	8%	928	5%	17,736	25%
15	Sukasari	4,888	53%	3,299	36%	613	7%	404	4%	9,204	17%
16	Kiarapedes	9,041	57%	4,890	31%	1,192	8%	696	4%	15,819	26%
17	Pondoksalam	9,354	55%	5,728	34%	841	5%	1,062	6%	16,985	21%
18	Total Suara	251.998	48%	193.221	37%	40.225	8%	34.367	7%	519.811	11%

Dalam kontestasi tersebut, pasangan Saepul Bahri Binzein – Abang Ijo Hapidin berhasil memenangkan kontestasi dengan total 251.998 suara, mengungguli pasangan Yadi Rusmayadi – Pipin Sopian dengan total 193.221 suara.

Penggunaan margin perolehan suara, yaitu selisih persentase suara pasangan Zeinjo dengan pesaing terkuatnya, dipilih sebagai indikator analisis karena dinilai lebih mampu menggambarkan tingkat dominasi elektoral dibandingkan persentase suara semata. Margin kemenangan yang besar tidak hanya menunjukkan keberhasilan kandidat dalam memenangkan kontestasi, tetapi juga memperlihatkan seberapa jauh kandidat tersebut mampu mengungguli lawan politiknya. Oleh karena itu, margin perolehan suara dapat digunakan sebagai ukuran yang lebih representatif untuk menilai efektivitas peran *kingmaker* dalam memobilisasi dukungan politik.

Data pada Tabel 1.1. menunjukkan adanya variasi capaian elektoral yang menarik dan menjadi titik awal penelitian ini. Apabila peran Dedi Mulyadi sebagai *kingmaker* bekerja secara dominan dan relatif seragam di seluruh wilayah Kabupaten Purwakarta, maka seharusnya efek elektoral yang dihasilkan juga menunjukkan pola yang relatif konsisten. Akan tetapi, data justru memperlihatkan perbedaan yang cukup mencolok antarkecamatan.

Pertama, dominasi elektoral yang sangat kuat di Kecamatan Maniis dengan margin kemenangan sebesar 42 persen. Pada kecamatan ini, Zeinjo memperoleh 63 persen suara dan mengungguli pesaing terdekatnya dengan margin terbesar di seluruh Kabupaten Purwakarta. Temuan ini menunjukkan kondisi efektivitas peran *kingmaker* tampak bekerja secara sangat optimal dalam mengonsolidasikan dukungan politik.

Kedua, efektivitas yang moderat di Kecamatan Wanayasa dengan margin kemenangan sebesar 8 persen. Temuan ini menjadi menarik karena Wanayasa merupakan kecamatan yang memiliki nilai simbolik penting, baik sebagai lokasi penyelenggaraan kegiatan *KDM Menyapa Purwakarta* maupun sebagai salah satu basis identitas budaya Sunda di Purwakarta. Meskipun demikian, margin kemenangan yang diperoleh relatif tipis. Kondisi tersebut menghadirkan sebuah

paradoks, yakni mengapa wilayah yang dijadikan panggung simbolik utama justru tidak menghasilkan dominasi elektoral yang lebih kuat.

Ketiga, kekalahan yang signifikan di Kecamatan Bungursari dengan margin negatif sebesar 31 persen. Di wilayah ini, Zeinjo hanya memperoleh 30 persen suara dan kalah dari pasangan Yadi–Pipin yang meraih 61 persen suara. Temuan tersebut dapat dikategorikan sebagai *deviant case* atau kasus menyimpang, yaitu kondisi ketika efektivitas peran *kingmaker* tidak hanya gagal menghasilkan dominasi elektoral, tetapi tidak mampu mengantarkan kandidat yang didukungnya memenangkan kontestasi.

Variasi tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas peran *kingmaker* tidak berlangsung secara seragam di setiap wilayah, melainkan berkaitan dengan konteks sosial dan kultural lokal yang kompleks. Dengan demikian, efektivitas peran *kingmaker* tidak dapat dipahami sebagai fenomena yang bersifat universal, tetapi perlu dilihat dalam konteks karakteristik masing-masing wilayah. Untuk memahami fenomena tersebut secara lebih komprehensif, penelitian ini difokuskan pada tiga kecamatan yang menunjukkan karakteristik kontras, yaitu Kecamatan Maniis sebagai wilayah dengan efektivitas tertinggi, Kecamatan Wanayasa sebagai wilayah dengan efektivitas moderat sekaligus memiliki nilai simbolik yang kuat, serta Kecamatan Bungursari sebagai wilayah yang menunjukkan kegagalan peran *kingmaker*.

Pemilihan ketiga lokus penelitian tersebut didasarkan pada logika *most-different cases design* (*desain kasus yang paling berbeda*), yaitu strategi metodologis yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi faktor-faktor kontekstual yang melatarbelakangi perbedaan efektivitas peran *kingmaker* di setiap wilayah (Przeworski, 1970). Melalui perbandingan ketiga kasus tersebut, penelitian ini berupaya memahami mengapa peran *kingmaker* menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi di satu wilayah, moderat di wilayah lain, dan mengalami kegagalan pada wilayah yang berbeda.

Kecamatan Wanayasa secara khusus dipilih sebagai titik tengah karena memiliki nilai strategis ganda, yakni sebagai kasus dengan tingkat efektivitas moderat secara metodologis dan sebagai wilayah yang memiliki nilai historis

sebagai salah satu cikal bakal Kabupaten Purwakarta yang hingga kini masih mempertahankan identitas kultural Sunda.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, terdapat tiga celah yang belum dijawab oleh literatur yang ada. Pertama, mayoritas studi *kingmaker* di Indonesia berfokus pada *kingmaker* dinasti (Dona, 2022); (Rusman, Rafni, & Suryanef, 2022) atau *kingmaker* elit nasional (Ilham, Asdar, & Muhammad, 2024). Kajian terhadap *kingmaker* nondinasti di level kabupaten yang membangun dukungan berbasis kapital simbolik-kultural masih terbatas. Kedua, penelitian sebelumnya cenderung menjelaskan keberhasilan peran *kingmaker* tanpa menelaah batas efektivitasnya. Padahal, memahami kapan dan mengapa peran *kingmaker* gagal sama pentingnya untuk membangun teori yang utuh. Ketiga, dimensi persepsi masyarakat terhadap praktik *kingmaker* terutama tingkat kesadaran kritis warga mengenai mekanisme politik di balik layar belum banyak dieksplorasi dalam konteks Pilkada lokal di Indonesia.

Penelitian ini menjadi penting karena praktik *kingmaker* memiliki implikasi serius terhadap kualitas demokrasi lokal. Secara formal, praktik dukungan politik oleh elit terhadap kandidat tertentu bukanlah tindakan yang dilarang dalam penyelenggaraan Pilkada. Namun secara substantif, praktik ini berpotensi: (1) mendistorsi prinsip kompetisi elektoral yang setara, karena hanya kandidat dengan akses ke elit kuat yang memiliki peluang kemenangan; (2) menggeser fokus pemilih dari evaluasi program ke loyalitas figur; dan (3) membuka ruang konflik kepentingan, terutama ketika *kingmaker* adalah pejabat aktif yang sedang mencalonkan diri ke posisi lain. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kualitas demokrasi yang mensyaratkan adanya kompetisi yang terbuka dan setara antarpeserta politik (Dahl, 1989).

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini akan mengkaji peran Dedi Mulyadi sebagai *kingmaker* lokal dalam kemenangan pasangan Zeinjo pada Pilkada Purwakarta 2024, efektivitas perannya di tiga kecamatan berbeda (Maniis, Wanayasa, dan Bungursari), serta persepsi masyarakat terhadap keterlibatannya. Dengan pendekatan studi kasus komparatif, penelitian ini berjudul: “Analisis Peran Elit Politik Dedi Mulyadi Sebagai *Kingmaker* Lokal Dalam Kemenangan Saepul Bahri Binzein Pada Pilkada Purwakarta 2024”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran elit politik Dedi Mulyadi sebagai *kingmaker* lokal dijalankan dalam kemenangan pasangan Zeinjo pada Pilkada Purwakarta 2024?
2. Mengapa efektivitas peran Dedi Mulyadi sebagai *kingmaker* berbeda antara Kecamatan Maniis, Wanayasa, dan Bungursari pada Pilkada Purwakarta 2024?
3. Bagaimana persepsi masyarakat di Kecamatan Maniis, Wanayasa dan Bungursari terhadap keterlibatan Dedi Mulyadi dalam proses tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan peran elit politik Dedi Mulyadi sebagai *kingmaker* lokal yang dijalankan melalui berbagai strategi politik dalam kemenangan pasangan Zeinjo pada Pilkada Purwakarta 2024.
2. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan efektivitas peran Dedi Mulyadi sebagai *kingmaker* antara Kecamatan Maniis, Wanayasa, dan Bungursari pada Pilkada Purwakarta 2024.
3. Memahami persepsi masyarakat di Kecamatan Maniis, Wanayasa, dan Bungursari terhadap keterlibatan Dedi Mulyadi dalam proses tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

a) Secara Praktis:

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi tiga pemangku kepentingan.

Pertama, bagi masyarakat pemilih, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran kritis terhadap mekanisme politik yang bekerja di balik layar Pilkada, sehingga masyarakat memiliki bekal untuk mengevaluasi kandidat tidak hanya berdasarkan figur pendukung, tetapi juga berdasarkan rekam jejak dan program yang ditawarkan.

Kedua, bagi penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, temuan penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam

merumuskan strategi pendidikan politik pemilih (*voter education*) yang lebih kontekstual, terutama di wilayah-wilayah yang rentan terhadap dukungan elit politik nonkandidat.

Ketiga, bagi praktisi politik dan pengamat demokrasi lokal, penelitian ini memberikan pemetaan empiris tentang bagaimana praktik *kingmaker* bekerja secara berbeda di berbagai konteks sosial-kultural, yang dapat digunakan sebagai dasar analisis untuk pilkada-pilkada selanjutnya.

b) Secara Akademis:

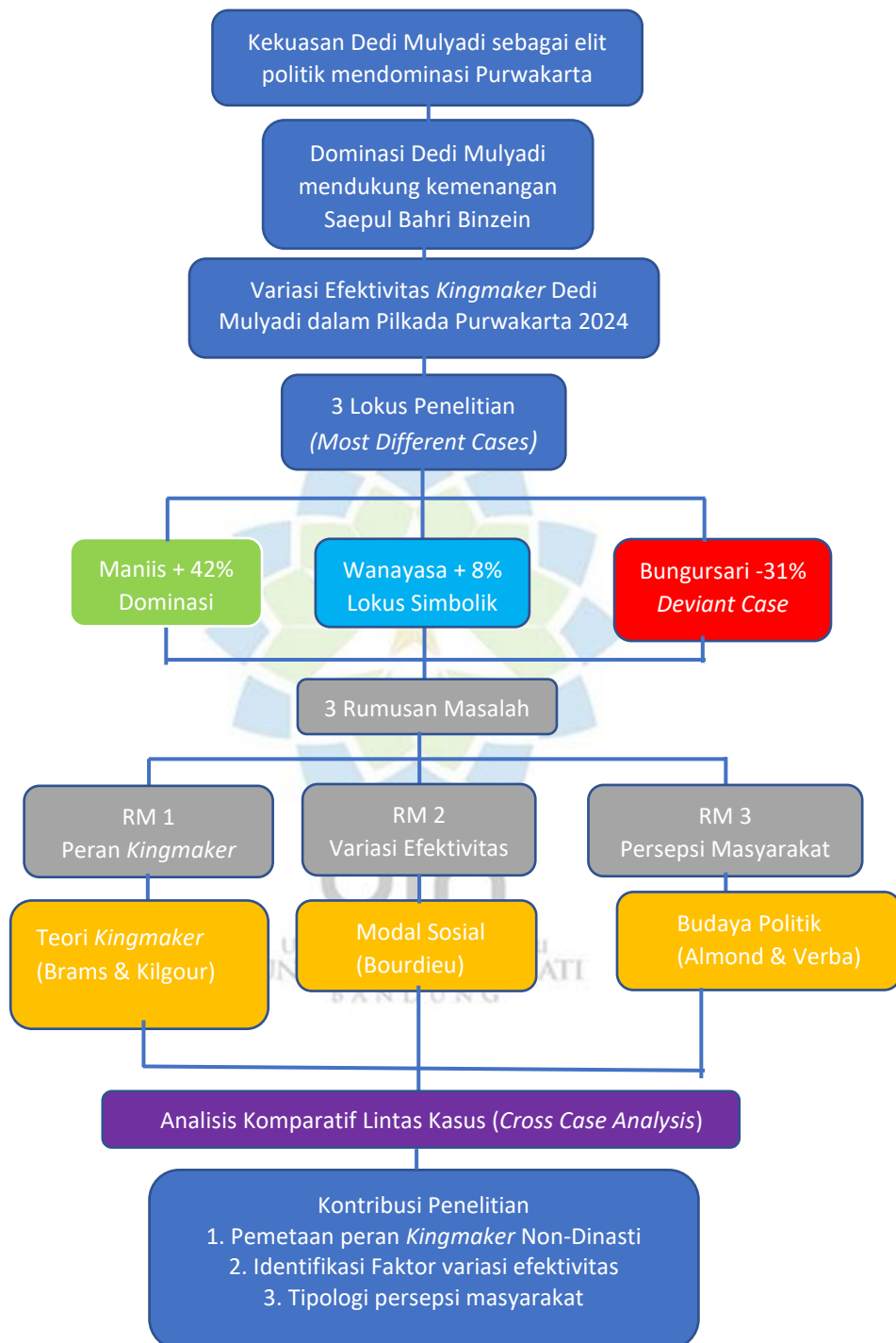
Pertama, kontribusi konseptual. Penelitian ini memperkaya kajian *kingmaker* dalam ilmu politik dengan menelaah karakter *kingmaker* nondinasti di level kabupaten, yakni elit politik lokal yang membangun dukungan melalui kapital simbolik dan kultural, bukan berdasarkan ikatan kekerabatan maupun jabatan nasional. Karakter ini berbeda dari penelitian terdahulu yang lebih banyak mengkaji *kingmaker* dinasti politik (Dona, 2022); (Rusman, Rafni, & Suryanef, 2022) dan *kingmaker* elit nasional (Ilham, Asdar, & Muhammad, 2024).

Kedua, kontribusi teoretis. Penelitian ini menggunakan kerangka Modal Sosial (Bourdieu, 1986) untuk menjelaskan bagaimana kapital simbolik dan kultural seorang elit lokal dikonversi menjadi kapital elektoral dalam Pilkada. Selain itu, Teori Budaya Politik (Almond & Verba, 1963) digunakan untuk memahami pembentukan serta diferensiasi persepsi masyarakat terhadap praktik *kingmaker*.

Ketiga, kontribusi empiris. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada keberhasilan *kingmaker*, penelitian ini menelaah batas dan variasi efektivitas peran *kingmaker* melalui desain *most-different cases design* (*desain kasus yang paling berbeda*) di tiga kecamatan yang kontras, yaitu Maniis, Wanayasa, dan Bungursari. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi rujukan metodologis bagi penelitian lanjutan mengenai praktik *kingmaker* dalam berbagai konteks demokrasi lokal di Indonesia.

E. Kerangka Berpikir

Gambar 1.5. Skema Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir penelitian ini disusun untuk memetakan alur logis dari fenomena empiris menuju kontribusi akademis. Alur tersebut dimulai dari identifikasi paradoks empiris, dilanjutkan dengan strategi metodologis untuk menjawabnya, hingga menghasilkan kontribusi penelitian yang spesifik.

Penelitian ini berangkat dari paradoks empiris dalam Pilkada Purwakarta 2024. Dedi Mulyadi, sebagai elit politik lokal dengan rekam jejak dua periode sebagai Bupati Purwakarta, menjalankan peran sebagai *kingmaker* untuk mendukung pasangan Saepul Bahri Binzein dan Abang Ijo Hapidin (Zeinjo). Peran tersebut dijalankan melalui berbagai strategi politik, meliputi panggung kultural-simbolik, forum konsolidasi formal, kedekatan personal-historis, hingga pelebagaan dukungan melalui keterlibatan keluarga dalam tim kemenangan.

Namun, hasil Pilkada menunjukkan bahwa efektivitas peran *kingmaker* tersebut tidak berlangsung secara seragam di seluruh wilayah Purwakarta. Jika peran Dedi Mulyadi bekerja secara merata, maka secara logis seharusnya menghasilkan pola elektoral yang relatif konsisten. Data empiris justru menunjukkan variasi yang signifikan antarkecamatan. Berdasarkan paradoks tersebut, penelitian ini memilih tiga kecamatan sebagai lokus penelitian dengan menggunakan logika *most-different cases design* (*desain kasus yang paling berbeda*). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengidentifikasi faktor-faktor kontekstual yang menjelaskan perbedaan efektivitas *kingmaker* di masing-masing wilayah.

Kecamatan Maniis dipilih sebagai representasi efektivitas tertinggi. Dengan margin kemenangan sebesar +42% (Zeinjo 63% dan pesaing terkuat 21%), Maniis merepresentasikan kondisi ketika peran *kingmaker* bekerja secara sangat efektif. Lokus ini digunakan untuk menjelaskan mengapa peran *kingmaker* dapat menghasilkan dominasi elektoral yang kuat.

Kecamatan Wanayasa dipilih sebagai representasi efektivitas moderat sekaligus lokus simbolik. Meskipun menjadi lokasi penyelenggaraan acara "KDM Menyapa Purwakarta" pada 19 Juli 2024, yang menunjukkan tingginya investasi simbolik Dedi Mulyadi, margin kemenangan Zeinjo di wilayah ini hanya mencapai +8%. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai

mengapa investasi simbolik yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan dominasi elektoral.

Sementara itu, Kecamatan Bungursari dipilih sebagai *deviant case* atau kasus anomali. Dengan margin -31% (Zeinjo memperoleh 30% suara dan pesaing utama 61%), Bungursari merepresentasikan kondisi ketika peran *kingmaker* tidak menghasilkan kemenangan elektoral. Kasus ini penting untuk memahami batas efektivitas peran *kingmaker* dalam konteks tertentu.

Ketiga lokus tersebut dipilih bukan berdasarkan keterwakilan geografis, melainkan karena kontras analitis yang ditawarkan. Melalui perbandingan antarkasus, penelitian ini berupaya mengidentifikasi kondisi-kondisi yang memengaruhi efektivitas peran *kingmaker* dalam Pilkada Purwakarta 2024.

Rumusan masalah pertama bersifat deskriptif, yaitu memetakan peran Dedi Mulyadi sebagai *kingmaker* lokal dalam Pilkada Purwakarta 2024. Pertanyaan ini menjawab dimensi bagaimana, yakni bagaimana peran tersebut dijalankan melalui berbagai strategi politik serta dalam bentuk konkret apa peran *kingmaker* termanifestasi.

Rumusan masalah kedua bersifat eksplanatif, yaitu menjelaskan mengapa efektivitas peran Dedi Mulyadi sebagai *kingmaker* berbeda di Kecamatan Maniis, Wanayasa, dan Bungursari. Pertanyaan ini berfokus pada penjelasan mengenai variasi efektivitas peran *kingmaker* di setiap lokus penelitian. Pertanyaan ini merupakan *core contribution* penelitian karena menelaah batas efektivitas *kingmaker*, sesuatu yang belum banyak dijelaskan dalam penelitian terdahulu.

Rumusan masalah ketiga bersifat interpretatif, yaitu memahami bagaimana masyarakat memaknai keterlibatan Dedi Mulyadi dalam Pilkada Purwakarta 2024. Pertanyaan ini menjawab dimensi bagaimana persepsi masyarakat terbentuk, bagaimana masyarakat membaca tanda-tanda politik di sekitarnya, serta sejauh mana mereka menyadari mekanisme *kingmaker* yang sedang berlangsung.

Ketiga rumusan masalah tersebut saling melengkapi. Pertanyaan pertama memberikan gambaran mengenai peran *kingmaker*, pertanyaan kedua memberikan penjelasan mengenai variasi efektivitasnya, sedangkan pertanyaan

ketiga memberikan pemahaman mengenai persepsi masyarakat. Tanpa salah satu di antaranya, pemahaman terhadap fenomena *kingmaker* akan menjadi parsial.

Untuk menjawab ketiga rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan tiga teori yang dikelompokkan ke dalam tiga *cluster* analitis. *Cluster* pertama terdiri atas Teori *Kingmaker* (Brams & Kilgour, 2010). *Cluster* ini berfungsi sebagai kerangka operasional untuk mengidentifikasi dua kekuatan utama *kingmaker*, yaitu *power to choose leader* dan *power to direct support*.

Cluster kedua menggunakan Teori Modal Sosial (Bourdieu, 1986). *Cluster* ini berfungsi untuk menjelaskan variasi efektivitas peran *kingmaker* antarlokus penelitian. Bourdieu menawarkan kerangka mengenai konversi kapital, yakni bagaimana kapital simbolik (*prestise, kehormatan, dan pengakuan sosial*) dan kapital kultural (*pengetahuan, nilai-nilai budaya, dan identitas lokal yang dihargai*) dapat dikonversi menjadi kapital elektoral. Lebih lanjut, teori ini menjelaskan mengapa kapital yang sama dapat bekerja efektif dalam satu *field* (arena sosial), tetapi kurang efektif atau bahkan gagal dalam *field* yang lain. Perspektif ini membantu menjelaskan mengapa peran *kingmaker* yang dijalankan Dedi Mulyadi berhasil di Kecamatan Maniis, tetapi tidak menghasilkan efek yang sama di Kecamatan Bungursari.

Cluster ketiga terdiri atas Teori Budaya Politik (Almond & Verba, 1963). *Cluster* ini digunakan untuk memahami persepsi masyarakat terhadap praktik *kingmaker* melalui tipologi budaya politik parokial, subjek, dan partisipan. Teori ini membantu peneliti mengkategorikan orientasi dan tingkat kesadaran politik masyarakat dalam memandang praktik *kingmaker*.

Ketiga teori tersebut tidak bekerja secara terpisah, melainkan diintegrasikan melalui analisis komparatif lintas-kasus (*cross-case analysis*). Analisis ini membandingkan temuan dari ketiga lokus penelitian untuk mengidentifikasi pola persamaan, pola perbedaan, serta faktor-faktor kontekstual yang memengaruhi efektivitas *kingmaker*.

Pendekatan komparatif ini penting karena fenomena *kingmaker* tidak dapat dipahami secara utuh hanya melalui satu kasus tunggal. Melalui kontras antarkasus, penelitian ini berupaya mengidentifikasi *boundary conditions*, yaitu

kondisi-kondisi batas yang menentukan kapan dan dalam konteks apa peran *kingmaker* bekerja secara efektif.

Penelitian ini diharapkan menghasilkan tiga kontribusi utama. Pertama, pemetaan peran *kingmaker* nondinasti di level kabupaten melalui strategi politik yang dijalankan oleh elit lokal. Kontribusi ini memperluas kajian *kingmaker* yang selama ini lebih banyak berfokus pada *kingmaker* dinasti politik maupun *kingmaker* elit nasional, dengan menunjukkan bagaimana peran *kingmaker* dapat dijalankan melalui pemanfaatan kapital simbolik dan kultural tanpa bertumpu pada ikatan kekerabatan maupun jabatan nasional.

Kedua, identifikasi faktor-faktor yang menjelaskan variasi efektivitas peran *kingmaker* di tiga lokus penelitian. Kontribusi ini mengisi kekosongan dalam literatur yang selama ini lebih banyak menjelaskan keberhasilan *kingmaker* tanpa menelaah mengapa efektivitasnya dapat berbeda antarwilayah.

Ketiga, penyusunan tipologi persepsi masyarakat terhadap praktik *kingmaker* melalui pemetaan tingkat kesadaran politik warga di tiga lokus penelitian. Temuan ini diharapkan dapat menjadi pijakan empiris bagi pengembangan strategi pendidikan politik pemilih (*voter education*) yang lebih kontekstual.

Secara keseluruhan, kerangka berpikir penelitian ini bergerak dari anomali empiris menuju kontribusi akademis melalui alur yang sistematis. Variasi efektivitas *kingmaker* memunculkan kebutuhan untuk memilih tiga lokus yang kontras; ketiga lokus tersebut dianalisis melalui tiga rumusan masalah yang saling berjenjang; ketiga rumusan masalah dijawab dengan tiga teori dalam tiga *cluster* analitis; dan seluruh teori tersebut diintegrasikan melalui analisis komparatif lintas-kasus untuk menghasilkan kontribusi akademis yang spesifik bagi kajian *kingmaker* dalam ilmu politik.